

Jakarta, 16 Juni 2014

Debat Capres Putaran Kedua: Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia?

Anggaran negara merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, pada hakikatnya rakyatlah yang menentukan anggaran negara. Selain itu, APBN merupakan instrumen negara untuk menciptakan kesejahteraan warga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pemenuhan seluruh hak-hak dasar warga negara. Dalam sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, maka anggaran harus diarahkan kepada kemakmuran yang merata dan meningkat. Seluruh kekayaan alam dan potensi bangsa harus diolah untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat enam persoalan pokok yang menjadi kelemahan APBN yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya, dan hal ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) oleh pemimpin baru:

- Desain APBN sangat teknokratis dan belum diposisikan sebagai instrumen ideologis untuk mewujudkan tujuan bernegara yang diamanatkan konstitusi.
- APBN selalu didesain defisit sehingga memberi pintu bagi penambahan utang (dalam dan luar negeri).
- Asumsi ekonomi makro yang disusun hanya didasarkan kepada tujuan mikro.
- Alokasi atau belanja APBN belum mencerminkan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” karena sangat pro-birokrasi, inefisien, inefektif dan sarat koruptif
- APBN belum mencerminkan pelaksanaan amanah UU, misalnya alokasi anggaran kesehatan yang diharuskan minimal 5% dari APBN, namun selama ini masih di kisaran 2% dari total APBN.
- Penerimaan negara sangat rendah, baik yang bersumber dari pajak maupun PNBPN (penerimaan negara bukan pajak).

Dalam debat kandidat tanggal 15 Juni 2014, terdapat beberapa hal penting kami kritisi, antara lain:

1. Kebijakan Pajak

Baik Jokowi maupun Prabowo tidak mempunyai pandangan yang komprehensif tentang pajak. Bahkan Jokowi dan Prabowo belum memandang penerimaan negara dari pajak sebagai penerimaan utama. Buktinya, 70-80% rata-rata, sumber APBN kita berasal dari pajak. Dalam debat semalam, Jokowi dan Prabowo nampak belum mempunyai strategi yang komprehensif dan serius tentang tata-kelola perpajakan (*fiscal policy*). Ini terlihat jelas tidak adanya keberanian mereka menentukan besaran *tax ratio* yang akan dicapai. Justru, Jokowi dan Prabowo lebih banyak menggantungkan sumber penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam.

Untuk mengetahui kondisi dari penerimaan negara, dapat diketahui dengan melihat *tax ratio* Indonesia. Penerimaan pajak Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tingkat ekonominya setara. *Tax ratio* Indonesia sampai tahun ini tidak pernah mencapai 14 persen, tahun 2013 saja hanya berkisar 12,7 persen. *Belum optimalnya tax ratio Indonesia menunjukkan adanya permasalahan mendasar pada sistem perpajakan Indonesia, merujuk Komisi Anggaran Independen (2012) dan Prakarsa Policy Review (2012) antara lain:*

- 1) sumber penerimaan pajak belum mencerminkan asas keadilan. Wajib pajak (WP) masih didominasi karyawan/pegawai dan masih kecilnya kontribusi dari WP individu kaya (*high wealth individuals*);

- 2) kesadaran publik untuk membayar pajak masih rendah, jumlah wajib pajak pada akhir 2011 mencapai 22 juta wajib pajak, terdiri dari 19,8 juta wajib pajak orang pribadi dan 2,2 juta wajib pajak badan. Padahal, dari jumlah penduduk lebih kurang 247 juta jiwa, potensi penduduk yang sudah bisa menjadi WP sekitar 60 juta;
- 3) penyalahgunaan atau korupsi perpajakan masih tinggi. Korupsi perpajakan tidak hanya oleh petugas pajak namun juga oleh WP;
- 4) tingginya penghindaran dan pengelakan pajak (*tax avoidance/tax evasion*) oleh WP pajak terutama WP korporasi dan individu kaya raya sehingga menghilangkan potensi penerimaan pajak;
- 5) masih kurang kuatnya regulasi perpajakan dan bahkan beberapa regulasi perpajakan yang ada terkesan tumpang-tindih;
- 6) Masih kacaunya kelembagaan bidang perpajakan di Indonesia. Misalnya, otoritas pajak yang berada di bawah kementerian keuangan membuat otoritas pajak tidak *power-full* dan yang lebih parah, lembaga peradilan pajak masih berada di bawah kementerian keuangan, padahal ini adalah otoritas yuridis.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Baik Jokowi dan terutama Prabowo sama-sama masih menggantungkan penerimaan negara yang berasal dari SDA (sumber daya alam), padahal alam Indonesia sudah “terkapling-kapling” oleh konsesi-konsesi lahan dan kontrak karya. Padahal, kontribusi PNBPN dalam APBN cenderung mengalami penurunan, khususnya penerimaan yang dikontribusikan dari sektor sumber daya alam. Terdapat dua hal yang mempengaruhi hal ini: 1) buruknya tata kelola SDA yang menimbulkan kerugian negara; 2) ketidakadilan kontrak-kontrak karya pengelolaan SDA. Pada 2013 kebijakan renegotiasi yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal. Untuk kontrak karya, terdapat 9 (sembilan) perusahaan menyetujui keseluruhan, 23 perusahaan menyetujui sebagian, dan 5 (lima) perusahaan yang tidak setuju dengan poin-poin renegotiasi.

3. Pengelolaan BUMN

Baik Jokowi maupun Prabowo tidak secara spesifik melihat kinerja BUMN. Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh dikatakan belum memuaskan, terutama sikap pengelola BUMN dan Pemerintah yang telah mengabaikan aspek profesionalisme dalam pengelolaan bisnis utamanya. Hingga 2012 terdapat 141 BUMN yang terdiri dari 14 Perum, 109 Persero, dan 18 Persero Tbk. Dalam kurun waktu 2005-2011, kepemilikan saham cenderung mengalami penurunan, terutama pada BUMN berbentuk Persero.

Terdapat penurunan bagian pemerintah atas laba BUMN, yaitu Rp 30,1 triliun pada 2010 menjadi Rp 28,2 triliun pada 2011. Tetapi, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp 30,7 triliun pada 2012 dan Rp 33,5 triliun dalam APBN Perubahan 2013. Bagian laba BUMN yang diterima oleh negara sesungguhnya tidak sebanding dengan nilai Penyertaan Modal Negara di 141 BUMN sebesar Rp 573,3 triliun dan 5 BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan sebesar Rp 16,4 triliun sepanjang tahun 2010 - semester I tahun 2012. Dari 141 BUMN yang ada, hanya 118 BUMN saja yang menyumbangkan laba.

Kinerja BUMN Belum Memuaskan. Dalam kurun waktu 2005 – 2011, ditemukan sebanyak 6.433 kasus di tubuh BUMN dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 20,4 triliun. Pada induk perusahaan BUMN, terdapat 5.850 kasus dengan nilai temuan sebesar Rp 20,1 triliun selama periode yang sama. Sedangkan pada BUMN anak perusahaan terdapat 583 kasus dengan nilai temuan sebesar Rp 319 miliar.

4. Subsidi Pangan dan Energi

Baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama belum mengungkapkan kebijakan subsidi untuk pangan dan energi. Padahal kedua hal tersebut saat ini menjadi masalah besar dalam politik penganggaran Indonesia. Karena, subsidi memerlukan dana besar, dianggap sering tidak tepat sasaran, tetapi berat untuk dicabut karena dikhawatirkan memberikan bebas berlebih bagi rakyat. Kedua subsidi tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2010-2013) terus mengalami kenaikan alokasi, dari 201,2 triliun (APBN-P 2010) hingga menjadi 317,2 triliun (APBN 2013).

Oleh karena itu, diperlukan strategi dan rencana yang matang untuk menyikapi kebijakan subsidi. Sementara subsidi pangan juga selama ini bukan dimaksudkan untuk menguatkan kedaulatan pangan, sebaliknya justru dimanfaatkan untuk mendatangkan bibit dari luar negeri dan pupuk dalam penguasaan beberapa perusahaan saja. Subsidi energy dan pangan harus mendorong bagi kuatnya kedaulatan pangan dan menciptakan energy alternative untuk rakyat.

5. Utang Negara

Salah satu masalah besar dalam pengelolaan anggaran adalah utang. Jumlah utang yang sudah melebihi 2.137 triliun rupiah di akhir 2013 dianggap membatasi diskresi fiskal pemerintah. Tetapi, utang tidak menjadi salah satu masalah yang dibicarakan oleh kedua Capres, meskipun Moderator sudah menanyakan soal utang negara. Kedua Capres belum memberikan pandangan tentang bagaimana strategi pengelolaan utang negara agar bisa menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan peluang kesejahteraan rakyat.

Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat
Seknas FITRA, P3M, Prakarsa, KAU

Untuk mengetahui selengkapnya bisa menghubungi:

- Yenny Sucipto dari Seknas FITRA: 081333111446 (yenny@seknasfitra.org)
- Abdul Waidl dari P3M: 081280821339 (waidl2020@yahoo.com)
- Dani Setiawan dari Koalisi Anti Utang: 08129671744 (danisetia@gmail.com)
- Ah Maftuchan dari Perkumpulan Prakarsa: 08527774448 (amaftuchan@theprakarsa.org)